

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki keterbelakangan dan ketertinggalan dalam semua bidang kehidupan menuju suatu keadaan yang lebih baik dari pada keadaan sebelumnya. Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spirituil. Pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur, melalui peretumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur adanya pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pembangunan sektor ekonomi itu sendiri adalah proses untuk mengubah suatu keadaan supaya lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan kemakmuran masyarakat. Pelaksanaan pemerintah dalam rangka otonomi daerah menuntut kemampuan pemerintah daerah agar lebih kreatif menggali dan mengembangkan potensi sumber daya untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Potensi sumber daya di suatu daerah akan mempunyai arti dan manfaat bagi pembangunan ekonomi dan kemakmuran jika dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal.

Pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah lepas dari peranan para pelaku ekonomi yaitu pemerintahan yang berperan dengan instrumen kebijakan publik dan fiskal, swasta yang berperan dalam pengembangan investasi serta masyarakat yang dapat berperan sebagai input dari faktor produksi dan jaminan terciptanya pasar dalam perekonomian. Oleh karena itu maka campur tangan pemerintah dalam perekonomian sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas ekonomi terutama dalam menjaga ketersediaan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan. Dengan kebijakan publik pemerintah daerah dapat mengembangkan sarana-sarana kepentingan publik yang nyata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari hasil kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau negara. Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan melalui kesempatan yang diberikan pemerintah kepada daerah melalui otonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, fektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan Jana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang terus meningkat dan dinamis. Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka pemerintah menerapkan kebijakan fiskaal yang pada dasarnya merupakan alat atau instrumen pemerintah

yang sangat penting perannya dalam sistem perekonomian. Instrumen fiskal berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor dan secara khusus memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah agar terciptanya kemandirian keuangan pada suatu daerah dengan mengurus pemerintahannya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Menurut UU No 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan

sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah tetapi perlu juga diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintah daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu. Dalam kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak akan diimbangi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri. Dengan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah). Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah semakin kecil ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.

Untuk melihat kemandirian daerah dapat dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan dari pemerintah ditambah pinjaman. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya

meningkatkan kapasitas pertumbuhan daerah sehingga mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: Pendekatan sentralisasi, Pendekatan Desentralisasi. otonomi daerah merupakan pembangunan dengan pendekatan desentralisasi yang erat kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu tujuan utama desentralisasi adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, Pemerintah daerah (Pemda) diharapkan mampu mengali sumber sumber keuangan lokal ,khususnya melalui Pendaptan Asli Daerah Sidik (2009)

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua daerah persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil Pada umunya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain. Hal ini menyebabkan daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD dari suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah tersebut memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pemerintah pusat. Untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki terutama aparat perpajakan, baik kualitas intelektual maupun kualitas moralnya. Sehingga mampu menggali sumber-sumber pajak dan retribusi daerah baik melalui cara intensifikasi maupun melalui cam ekstensifikasi dengan menggali objek-objek pajak yang bare. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah sate tujuan penting

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut Kuncoro (2004). Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah. Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri.

Menurut Mankiw (2006) PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari satu tahun ke tahun yang lain dipantau dengan ukuran PDB. Namun, agar mampu mengeliminasi pengaruh dari perubahan harga, PDB yang digunakan adalah PDB atas dasar harga konstan karena pada ukuran tersebut faktor fluktuasi yang disebabkan oleh perbedaan harga telah dieliminasi. Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi daerah

adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan PDRB suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan asli daerah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber. Pendapatan asli daerah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan masih sering mengalami kendala, yaitu berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 5, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2013), kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah

memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, Mahmudi (2010). Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah, Kaho (2012). Namun, realita menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pemerintah daerah di Indonesia berhasil mencapai tingkat kemandirian keuangan yang diharapkan. Masih banyak pemerintah kabupaten/kota di daerah yang sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Salah satu pemerintah daerah yang masih menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam porsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya adalah pemerintah kota Sungai Penuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Renny (2011) dengan judul pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada kota di Jawa barat). Kedua faktor pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah mampu mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, dimana dalam penelitian sebelumnya kemandirian keuangan daerahnya dikaitkan dengan satu variabel saja yaitu pertumbuhan pendapatan asli daerah. Dalam rangka mengoptimalkan tingkat

kepercayaan publik, pemerintah daerah setempat dapat melakukan pergeseran komposisi belanja. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Nilai R 0.580 atau 58% menunjukkan hubungan atau korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah adalah sedang karena berada dikisaran 0.50-0.699. Nilai *Adjusted R Square* 0.356 atau 35.6%, ini menunjukkan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah sebesar 35.6%, sisanya sebesar 0.644 atau 64.4% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini, misalnya Belanja Daerah.

TABEL 1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) , PENERIMAAN DAERAH
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
KOTA SUNGAI PENUH

TAHUN	PAD (RP)	PENERIMAAN DAERAH (Rp)	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	Kemandirian Keuangan Daerah (%)
2011	14.356.365.035	111.401.654.753	6,86	12,9
2012	19.705.802.062	472.331.609.627	7,09	4,17
2013	24.266.664.871	557.416.319.774	8,45	4,35
2014	33.199.858.218	598.264.229.650	7,54	5,54
2015	36.246.931.832	626.260.069.030	7,06	5,78
2016	36.632.476.375	707.126.130.192	6,56	5,18
2017	31.420.979.313	686.257.724.247	6,01	4,58
2018	34.184.049.669	727.122.042.033	4,88	4,70
2019	34.900.741.628	828.380.490.094	5,04	4,21

2020	29.050.525.938	749.342.006.963	-0,24	3,88
JUMLA H	257.368.551.042	5.438.374.566.956	52,49%	47,3
RATA- RATA	25.736.855.104	543.837.456.695	5,25	4,7

SUMBER: DPJK

Berdasarkan data di atas dapat di lihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerimaan Daerah Kota Sungai Penuh dari tahun 2011-2020 mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak stabil dari tahun ke tahun hal ini di karenakan masih banyak penduduk yang tidak taat membayar pajak maka akan tidak stabil pendapatan yang diterima Kota Sungai penuh, hal yang berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang diproksi denga *Produk Domestik Regional bruto* Atas Dasar Harga Konstan (PDRB –ADHK) yang mengalami fluktuasi dari tahun 2011-2020.

Menurut Nogi (2007) bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian Keuangan daerah di antaranya potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemampuan Dinas Pendidikan Daerah , artinya kemandirian Keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah(PAD) merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Pada Tahun 2011-2020.**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di ambil suatu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Pada tahun 2011-2020 secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh pada tahun 2011-2020 secara parsial?
3. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Pada tahun 2011-2020 secara simultan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diuraikan tujuan penelitiannya yaitu

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2020 secara parsial.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2011-2020 secara parsial.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2011-2020 secara parsial dan secara simultan



1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis sebagai peneliti pemula tentang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Sungai Penuh
- b. Dapat menambah referensi bagi peneliti berikutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi atau masukan kepada badan keuangan daerah Kota Sungai Penuh.
- b. Dapat memberikan perbendaharaan dan bahan perbandingan atau kajian bagi pihak keuangan daerah Kota Sungai Penuh.

